

EDISI : Jumat, 20 September 2019

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :  
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL  
SETDA KABUPATEN BULELENG

**RESUME BERITA**

EDISI :Jumat, 20 September 2019

NO	NAMA MEDIA	JUDUL BERITA	RESUME	KET.
1	NUSA BALI	BPBD Buka Posko Darurat bencana	Kemarau panjang yang menghantui Buleleng sejak bulan Juni lalu mengharuskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng membuka Posko Darurat Bencana. Hingga kini BPBD Buleleng juga secara rutin melayani pemerintahan air bersih di sejumlah wilayah terdampak kekeringan di buleleng. Intensitas pengiriman yang dilakukan sejak hulan Agustus pun saat ini meningkatkan hingga mencapai rata-rata 15 ribu liter perhari atau setara dengan tiga tangki.	
		Bayar PBB setelah 30 September Kena Denda 2%	Badan keuangan daerah buleleng menjelang batas akhir pembayaran pajak bumi bangunan sektor perkotaan dan pedesaan, 30 september mendatang mengkliaim realisasi sudah mencapai 71%. Realisasi target pembayaran pun masih akan digenjot hingga bulan desamber mendtang. Hanya saja wajib pajak akan dikenakan denda 2 persen dari besaran pajak yang dibayrakan lewat jatuhan tempo.	
2	FAJAR BALI	Buleleng Gelar Pennyuluhan Bahasa media Luar Ruang	Balai bahasa bali, badan pengembangan basah dan perbukuan kementrian pendididkan dan kebudayaan memberikan penyuluhan penggunaan bahasa media luar ruang di kabupaten buleleng. Penyuluhan yang diikuti OPD seluruh kabupaten buleleng ini gelar diruang rapat unit IV setda kabupaten buleleng beberapa hari kemarin. Kepala balai bahasa bali to machsum,M.Ag. menjadi pemateri untuk penyeluhan ini ia berharap balai bahasa bali ampu member wawasan dan pencerahan	



## KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali post

Kategori : Pilkel

# Surat Suara Pilkel Hitam Putih Dikhawatirkan Pemilih Sulit Kenali Foto Calonnya

Pencetakan surat suara pemilihan perbekel (pilkel) serentak tahun 2019 telah rampung. Namun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) selaku panitia pilkel di kabupaten sekarang masih memilah dan melipat surat suara sesuai jumlah pemilih masing-masing desa yang menggulirkan pilkel serentak itu. Calon perbekel yang akan bertarung pada 31 Oktober 2019 itu baru mengetahui surat suara hitam putih itu setelah seluruh surat suara itu dicetak dan memasuki tahapan pelipatan. Lalu, apa kekhawatiran dari banyak pihak terkait keberadaan surat suara yang tidak berwarna itu?

SALAH seorang calon perbekel Desa Panji Kecamatan Sukasada, Dewa Gede Karyawan, mengatakan Kamis

(19/9) kemarin, dirinya baru mengetahui surat suara itu berwarna hitam putih setelah mendapat informasi dari

panitia pilkel di desanya. Setelah dilihat, ternyata surat suara yang memuat foto dirinya sebagai calon perbekel itu warnanya memang hitam putih. Bahkan, cetakan foto masing-masing calon perbekel pun buram dan kurang jelas. Otomatis, cetakan surat suara yang tidak berwarna itu diprediksi akan menyulitkan pemilih mengenali calon yang akan dicoblos nanti.

Cetakan surat suara dari PMD itu pun berbeda dengan foto-foto yang sudah disebar di media terkait sosialisasi dirinya sebagai calon perbekel. Atas kondisi ini, Karyawan khawatir ka-

lau warna surat suara hitam putih itu dapat memengaruhi perolehan suara pada pencoblosan mendatang. Pasalnya, foto yang hitam putih itu bisa saja menyulitkan pemilih mengenali calon yang akan dipilihnya.

Dirinya dikasi contoh surat suara berwarna hitam putih. Padahal foto-foto yang digunakan dalam sosialisasi berwarna. Karena itu, ia memprediksi ada pengaruhnya terhadap perolehan suara.

"Apalagi foto calonnya itu buram. Seharusnya, pemilih sudah kenal foto surat suara calon itu dari foto-foto saat dilakukan sosialisasikan.

Karena ini warnanya hitam putih, maka saat pencoblosan bisa saja sulit dikenali," ujarnya.

Atas kondisi ini, Karyawan berharap panitia pilkel kabupaten dan panitia pilkel di desa menyikapi masalah ini. Dirinya berharap ada solusi terbaik, sehingga tidak merugikan calon perbekel yang akan bertarung.

"Menurut kami fotonya berwarna, sehingga apa yang menjadi identitas pada pemilih itu, kami bisa dikenali. Hal itu akan memudahkan pemilih dan menghindari suara tidak sah karena salah coblos," jelasnya.

Kepala Dinas PMD Buleleng Made Subur ketika dikonfirmasi mengatakan, sesuai regulasi surat suara telah ditetapkan berwarna hitam putih. Selain itu, untuk menghindari surat suara palsu, rekanan pemenang tender telah menggunakan kertas yang mudah dibedakan dengan kertas yang digunakan untuk fotokopi. Terkait kualitas cetakan, birokrat asal Desa Banyuwatis, Kecamatan Banjar itu menyebut, saat ini, PMD masih melakukan sortir dan pelipatan surat suara. Kalau ditemukan cetakan buram pada tahapan itu apalagi

robek atau kesalahan foto serta tulisan, maka PMD mewajibkan rekanan untuk mencetak surat suara pengganti. Mengapa tidak berwarna? Karena regulasi mengatur surat suara itu memang hitam putih. "Sekarang kami sedang sortir dan kalau ada buram seperti dikeluhkan itu akan kita pilah. Kemudian akan dicetakan surat pengganti kalau memang terjadi kesalahan pencetakan," jelasnya.

Di sisi lain, Subur mengatakan, seluruh surat suara untuk 79 desa yang mengeluh pilkel serentak itu malah telah tercetak. (mud)



## KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali Post

Kategori : Pendidikan

### Genjot Publikasi Jurnal

# Undiksha Tingkatkan Daya Saing

SEJUMLAH dosen Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) diberikan penghargaan oleh Rektor Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., Kamis (19/9) kemarin. Penghargaan itu diberikan karena artikel-artikel yang dibuat dosen-dosen Undiksha itu mampu terbit pada jurnal terakreditasi Sinta. Capaian prestasi itu diapresiasi positif oleh rektor karena sekaligus mampu mendukung pe-ranking-an universitas, baik tingkat nasional maupun internasional.

Rektor Undiksha Prof. Dr. Nyoman Jampel menjelaskan, publikasi jurnal itu sudah diinisiasi tahun 2016 yang dibarengi dengan pembentukan tim pengembangan. Kebijakan itu membuahkan hasil positif sebab tahun 2019 ini, tercatat sudah ada 22 jurnal yang masuk akreditasi Sinta. Hal tersebut menempatkan Undiksha di posisi ketujuh

dari 12 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Indonesia. Malah di luar jumlah itu sudah ada 50 jurnal yang sedang dalam proses sertifikasi.

"Kami berharap, bulan ini juga sudah terbit sertifikat Sinta. Sehingga Undiksha kemudian akan punya 72 jurnal," katanya.

Tahun ini, ditargetkan ada seratus jurnal yang masuk Sinta. Jika hal tersebut mampu terpenuhi, maka otomatis peringkat Undiksha pada skala nasional, khususnya di lingkup LPTK bisa terus terdongkrak naik. Karena itu, diharapkan ada dukungan dari seluruh dosen.

"Kalau 100 jurnal itu bisa terwujud, maka Undiksha akan mampu masuk ke peringkat kedua. Ini yang perlu mendapat dukungan dari seluruh dosen," harap Prof. Dr. Nyoman Jampel.

Capaian itu juga akan menjadikan Undiksha se-

makin cepat dikenal. Baik pada tingkat nasional maupun internasional. "Kalau kita sudah memiliki 72 jurnal terakreditasi Sinta, maka secara otomatis Undiksha akan dicari dosen dari perguruan tinggi lain. Banyak dosen luar paham terhadap keberadaan Undiksha. Walaupun berada di daerah pinggiran, dengan prestasi yang ditoreh maka banyak akan memberikan apresiasi, jadi bukan lagi dipandang sebelah mata," tegas Rektor asal Nusa Dua, Badung ini.

Ia meminta para dosen untuk tidak puas atas capaian tersebut. Namun tetap melakukan upaya-upaya optimal sehingga nantinya dapat menghasilkan artikel pada *grade* yang lebih tinggi, termasuk pada jurnal bereputasi internasional atau *scopus*. Penghargaan yang juga ditujukan kepada Dekan dan Koordinator Prodi itu sebagai salah satu bentuk upaya me-

munculkan motivasi.

"Tentu kami sangat memberikan apresiasi atas hasil yang ditelurkan para dosen itu," tegas Prof. Jampel bangga.

Ketua Pusat Pengembangan Jurnal Undiksha Dr. I Wayan Widiana, S.Pd., M.Pd. menjelaskan, jurnal yang dihasilkan para dosen Undiksha itu terdiri dari berbagai bidang. Mulai dari ilmu pendidikan, sains, ekonomi, maupun ilmu sosial. Dirinya yang juga membayong empat penghargaan dari rektor itu menegaskan tetap melakukan upaya-upaya konstruktif dalam peningkatan jumlah jurnal itu, sehingga Undiksha semakin berdaya saing, punya daya tawar lebih tinggi.

"Kami berupaya mewujudkan jumlah jurnal yang ditargetkan. Saya mengapresiasi LPPM karena telah memberikan *support*," ujarnya. (kmb38)



**PUBLIKASI JURNAL** - Rektor Undiksha Singaraja Prof. Dr. I Nyoman Jampel terus berupaya meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Salah satu upaya itu dengan meningkatkan publikasi jurnal para dosennya yang bertugas di perguruan tinggi terbesar di Bali Utara itu.

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



## KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali Post

Kategori : Pemalsuan



Bali Post/kmb38

**PEMALSUAN KUITANSI - Unit Reskrim Polsek Kota Singaraja melimpahkan kasus pemalsuan kuitansi pembelian tanah yang melibatkan mantan anggota DPRD Buleleng dari Partai Hanura, Putu SJ.**

# Terlibat Pemalsuan Kuitansi Pembelian Tanah Berkas Mantan Dewan Sudah P-21

Singaraja (Bali Post) -

Seorang anggota DPRD Buleleng periode 2009-2014, Putu SJ (52), asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, terpaksa berurusan dengan penegak hukum. Pasalnya, SJ yang sebelumnya tercatat sebagai kader Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu terseret dugaan kasus pemalsuan kuitansi pembelian tanah seluas 5 are di Banjar Dinas Celuk Buluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng. Sejauh ini, berkas mantan dewan yang terlibat kasus pemalsuan kuitansi pembelian tanah itu sudah P-21 dan segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.

SJ diduga memperdaya korban Made Ariasa (49), warga Banjar Dinas Celuk Buluh, ketika menjual tanah miliknya seharga Rp 750 juta. Bukananya Ariasa mendapat uang penjualan tanah miliknya, tetapi korban justru tertipu setelah telanjur menandatangani kuitansi kosong atas pembelian tanah miliknya itu. Bahkan, sertifikat hak milik (SHM) tanah korban itu berhasil dimutasi (balik nama - red) atas nama SJ.

Kanit Reskrim Polsek Kota Singaraja Iptu Suseno seizin Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.I.K., Kamis (19/9) kemarin, mengatakan kasus pemalsuan ini berawal dari laporan korban

Made Ariasa Januari 2018 lalu. Kasus ini berawal tahun 2016 lalu, SJ bermaksud membeli tanah korban dengan luas 5 are. Setelah harga disepakati setiap satu are Rp 150 juta, SJ kemudian menyerahkan kuitansi kepada korban untuk ditandatangani. Konon, SJ meminta korban menandatangani kuitansi untuk keperluan membayar pajak.

Meskipun kuitansi yang ditandatangani itu kosong, Ariasa tidak curiga sama sekali. Korban kemudian memenuhi permintaan tersangka SJ itu. Setelah berhasil mendapatkan tanda tangan korban, SJ mengisi sendiri kuitansi itu, dengan keterangan telah menerima

uang sebesar Rp 750 juta dari tersangka SJ sebagai pembayaran pembelian tanah 5 are sesuai sertifikat No. 2536 atas nama korban Ariasa. SJ kemudian menguasai tanah korban dan sertifikatnya telah dibalik nama atas nama SJ. "Korban tidak pernah menerima uang atas penjualan tanah itu. Tetapi tersangka berdalih sudah membayar dengan menunjukkan kuitansi itu. Hasil penyelidikan tanah itu belum pernah dibayar tersangka, sehingga korban merasa dirugikan," katanya.

Keberatan dengan hal itu, Ariasa mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja. Selain itu, Ariasa kemudian melapor-

kan perbuatan SJ dengan tuduhan pemalsuan surat dan atau memberi keterangan palsu di dalam akta autentik atas pembelian sebidang tanah.

Polisi telah menahan SJ sejak 17 Juli 2019 lalu. Dia juga pernah melakukan penangguhan penahanan, karena SJ mengeluh sakit dan harus diopname di RSUD Buleleng. Polisi kembali melakukan penahanan lanjutan sejak 26 Juli 2019 sampai 14 Agustus 2019 yang diperpanjang hingga 22 September 2019. "Setelah berproses dan berkas sudah dinyatakan lengkap alias P-21, kami limpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Selain tersangka kami limpahkan barang bukti dua lembar kuitansi, sertifikat, dan barang bukti lain," tegasnya.

Sementara SJ di hadapan polisi menolak memberikan keterangan. Atas perbuatannya, SJ melanggar pasal 263 KUHP dan atau pasal 266 KUHP, dengan ancaman tujuh tahun penjara. (kmb38)

			tentang tata bahasa , ia juga menyebut bahsa Indonesia harus menjadi bahsa yang utama.
		Buleleng Duduki Juara Tiga	Meskipun boleh dikatakan buleleng belum memiliki sarana dan prasarana lengkap sebagai tempat lain yang memadai seperti lapangan menembak namun dalam pelaksanaan pecan olahraga provinsi Bli dimana buleleng tidak kalah kala dengan kabupaten yang lain. Hanya berbekal kebersamaan dan sportifitas untuk maju da merai juara untuk maju dan merai juara dengan mengusung sembayan ‘ meraih mendali, bukan melali ‘ akhirnya kabupaten buleleng yang memiliki wilayah yang paling luas di bali itu akhirnya mampu menobatkan dirinya sebagai juara ketiga dalam pelaksanaan porprov bali ke 14 ditahun 2019 ini.
		Mantan Anggota Dewan Buleleng Ditahan	Korban melaporkan mantan anggota dewan dari partai hanura itu pada januari 2018 silam. Menurut informasi yang sempat dikumpulkan di mapolres buleleng, kemarin menyambut pelaku dikatakan telah membeli tanah milik korban seluas lima are yang ada di kawasan desa kalibukbk, kecamatan buleleng namun disaat melakukan transaksi pelaku menyodorkan kwitansi kosong kepada korban untuk dilakukan penandatanganan.



## KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali Post

Kategori : BPBD

### Kekeringan Diprediksi Sampai November BPBD Optimalkan Distribusi Air Bersih

Singaraja (Bali Post) –

Menyusul perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan kemarau sampai November 2019, membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng tidak berdiam diri. Sejak awal kemarau sampai sekarang, personel Posko Siaga Bencana setiap hari mengirim bantuan air bersih. Bantuan air itu dikirim dengan armada mobil tangki. Hal itu dilakukan karena banyak desa di Buleleng dikategorikan desa rawan krisis air bersih. Meski demikian, pada musim kering ini, Buleleng belum masuk status darurat kekeringan.

Kepala Pelaksana BPBD Buleleng I.B. Suadnyana mengatakan hal itu, Kamis (19/9) kemarin, di sela-sela menerima bantuan pasokan air bersih dari Relawan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Posko Siaga Bencana.

ACT yang merupakan NGO (Non Government Organization) itu membantu menyuplai air bersih untuk warga di beberapa desa di Bali Utara. Aksi ini ditargetkan berakhir September 2019 ini. Selama di Buleleng, ACT sudah memasok air bersih bersama BPBD ke Desa Julah. Di sana, 400 kepala keluarga (KK) dilayani air bersih. Pihaknya juga akan membantu Desa Sawan dengan sasaran 350 Kepala Keluarga (KK).

Sejak Agustus lalu, tambah I.B. Suadnyana, pihaknya telah memfasilitasi desa atau kelompok

masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih. Hampir setiap hari, armada mobil tangki milik BPBD Buleleng dikerahkan untuk memasok air bersih. Hingga memasuki bulan ini, rata-rata sehari sampai tiga kali armada mobil tangki menyuplai air bersih. Berdasarkan data yang ada, permintaan air bersih paling banyak datang dari beberapa desa di Kecamatan Banjar, seperti Desa Cempaga, Kaliaseh. Selain itu, Desa Sari Mekar, Kecamatan Buleleng dan Desa Sawan, Kecamatan Sawan juga meminta bantuan air bersih. Tidak ketinggalan, warga di Desa Sembiran dan Desa Julah Kecamatan Tejakula juga mengalami persoalan yang sama. Semua telah ditangani dengan pasokan air bersih.

“Dari awal kemarau, kami sudah memasok air bersih dengan mengerahkan mobil tangki yang kami punya. Setiap hari, ada saja permintaan, sehingga personel posko siaga bencana sampai tiga kali sehari memasok air bersih. Kalau medan datar satu kali, kami bawaan 15 ribu liter. Namun jika medannya berbukit, setiap pengiriman bebannya dikurangi,” katanya.

Meskipun banyak desa di Buleleng mengalami krisis air bersih, namun mantan Camat Buleleng itu mengatakan, situasinya masih bisa ditangani. Karena itu, tidak masuk kategori darurat kekeringan. Seperti di daerah lain di luar Bali. Namun, dirinya tidak menganggap enteng persoalan ini. Apalagi perkiraan BMKG

yang menyebutkan kemarau panjang itu akan terjadi sampai November 2019. Sehingga tidak menutup kemungkinan memicu bertambahnya desa yang mengalami krisis air bersih itu.

#### Sumber Air Mengering

Dari pengamatan di lapangan, krisis air bersih itu terjadi karena sumber mata air baku atau air sumur dalam yang dikelola desa dan kelompok masyarakat itu, saat kemarau ini menurun drastis. Bahkan, beberapa sumber mata air baku itu sudah mengering.

Karena itu, pihaknya berterima kasih dengan dukungan NJO ACT yang berpartisipasi aktif mengatasi krisis air bersih di daerahnya. Bantuan air bersih itu dinilai sangat menolong warga. Sebab, warga yang akan bekerja ke kebun atau menjalani rutinitas setiap hari itu, tidak lagi terganggu harus mencari air ke sumber mata air yang notabene jauh dari permukiman.

“Sepertinya tidak sampai terjadi darurat kekeringan. Umumnya desa yang kesulitan air bersih itu karena bukan saja sumber air di desa bersangkutan debitnya kecil. Malah sudah mati total, sehingga untuk membantu warga maka mobil tangki yang memuat air bersih didistribusikan untuk dikerahkan ke desa-desa yang memerlukan air bersih. Apalagi kebetulan ada NGO yang ikut membantu, sehingga lebih banyak desa bisa kita sasar,” jelasnya. (kmb38)

